

Judul : DPR: bantu UMKM agar tidak jago kandang, RUU Kadin jadi inisiatif DPR
Tanggal : Rabu, 23 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Kadin Jadi Inisiatif DPR DPR: Bantu UMKM Agar Tidak Jago Di Kandang

SENAYAN resmi menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif DPR. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Sebelum putusan diketok, Cucun terlebih dahulu meminta persetujuan kepada para anggota dewan yang hadir. "Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU tentang Kamar Dagang dan Industri, dapat disetujui menjadi RUU usul DPR?" tanya Cucun, yang kemudian dijawab "setuju" oleh seluruh anggota dewan yang hadir.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Sturman Panjaitan mengatakan, Kadin diharapkan konkret membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing sehingga tidak hanya mengandalkan pasar domestik. Caranya dengan membantu para pelaku UMKM agar mampu menembus pasar internasional.

"Kita ingin meningkatkan peran Kadin. Mereka harus utuh, karena satu-satunya organisasi perdagangan yang membantu masyarakat, khususnya UMKM, agar mereka bisa *go internasional*. Tidak sekadar hanya jago kandang," kata Sturman di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut Sturman, kebutuhan akan peningkatan peran Kadin

semakin penting di tengah perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi digital. Sehingga regulasi Kadin juga perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian tersebut.

Dalam sisi kelembagaan, lanjut Sturman, Kadin juga perlu diarahkan untuk memperkuat kemitraannya dengan Pemerintah dalam bidang perdagangan, ekonomi, dan industri. Bahkan keberadaan kamar dagang di sejumlah negara menunjukkan pentingnya wadah dunia usaha dalam membangun jejaring perdagangan dengan negara lainnya. "(Revisi UU Kadin) untuk meningkatkan Kadin agar benar-benar bermanfaat menjadi mitra strategis Pemerintah dalam bidang perdagangan ekonomi dan industri," harap politisi PDIP ini.

Anggota Baleg DPR Rizal Bawazier menambahkan, revisi UU Kadin bertujuan untuk menghadirkan organisasi dunia usaha yang lebih modern, demokratis, transparan, dan inklusif. Penguatan kelembagaan Kadin juga memastikan pelaku UMKM, koperasi, perusahaan daerah, dan pengusaha di daerah memperoleh ruang representasi yang proporsional.

Rizal menjelaskan, beleid tersebut telah berlaku hampir 39 tahun sehingga perlu diperbarui untuk menjawab perkembangan ekonomi nasional yang semakin kompleks. Termasuk tuntutan representasi dunia usaha yang lebih inklusif, transparan, akuntabilitas organisasi, adaptif terhadap perkembangan dunia usaha, hingga transformasi ekonomi digital. ■ TIF